



**LAPORAN KINERJA  
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM  
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020 - 2021  
(6 Mei 2021 S.D 15 AGUSTUS 2021)**

---

## **PENDAHULUAN**

Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) sebagai bidang yang strategis di DPR RI membidangi ruang lingkup terkait Pertahanan, Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika, Intelijen, Dalam Negeri, Sekertariat Negara, Pemilu, Hukum, HAM, dan Keamanan. Ruang Lingkup bidang Korpolkam yaitu Alat Kelengkapan Dewan berupa Komisi (termasuk Komisi I, Komisi II, Komisi III), Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi.

Sedangkan alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan V tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei 2021 s.d 15 Agustus 2021. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 16 Juli 2021 s.d 15 Agustus 2021.

Adapun pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yakni:

### **I. RAPAT-RAPAT DPR RI**

#### **1) RAPAT PARIPURNA DPR RI**

1. **Senin, 31 Mei 2021**, mengikuti Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA.2022.
2. **Selasa, 22 Juni 2021**, mengikuti Rapat Paripurna ke-21 dengan agenda sebagai berikut:
  - a. Penyampaian Ikhtisar Hapsem (IHPS) II Tahun 2020 serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 oleh BPK RI.
  - b. Penyampaian LHP atas Lap. Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 serta penyerahan LHP atas LKPP (LHP LKPP) Tahun 2020 oleh BPK RI.
  - c. Penetapan perpanjangan waktu pembahasan RUU.
  - d. Penetapan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, Komisi VII DPR RI, dan Komisi X DPR RI.
3. **Selasa, 6 Juli 2021**, mengikuti Rapat Paripurna ke-22 dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

4. **Kamis, 15 Juli 2021**, mengikuti Rapat Paripurna ke-23 dengan agenda:

1. Penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 oleh Pemerintah;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Laporan Komisi VI DPR RI atas Hasil Pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021 – 2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;
4. Persetujuan Terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI:
  - RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
  - RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram; dan
  - RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;

6. Penetapan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU :

- RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen;

7. Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020 – 2021.

## 2) RAPAT PIMPINAN DPR RI.

1. **Kamis, 17 Juni 2021**, mengikuti Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain.
2. **Selasa, 13 Juli 2021**, mengikuti Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain.

### 3) RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN DPR RI.

1. **Kamis, 24 Juni 2021**, memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-Fraksi, Pimpinan Komisi I dengan Kementerian Luar Negeri dengan agenda membicarakan pencalonan Dubes Negara Sahabat untuk RI yakni:
  - a. Republik Senegal (Tuan Abdoulaye Barro, sebagai Calon Dubes Republik Senegal untuk RI)
  - b. Kerajaan Bahrain (Tuan Ahmed Abdullah Ahmed Alharmasi Alhajeri, sebagai Calon Dubes Kerajaan Bahrain untuk RI).

### 4) RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPR RI.

1. **Kamis, 17 Juni 2021**, mengikuti Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI dengan agenda membahas antara lain:
  - a. Surat masuk dari Presiden RI:
    - Nomor: R-21/Pres/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, hal: RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
    - Nomor: R-22/Pres/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, hal: RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - b. Surat BPK RI terkait Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 kepada DPR RI:
    - Surat Ketua BPK RI Nomor: 30/S/I/3/2021, tanggal 19 Maret 2021, hal: Permohonan Waktu Penyampaian Ikhtisar Hapsem II Tahun 2020.
    - Surat Ketua BPK RI Nomor: 47/S/I/3/2021, tanggal 31 Maret 2021, hal Penyampaian Ikhtisar Hapsem II Tahun 2020 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.
    - Nomor Surat: 90/S/I/6/2021, Perihal: Permohonan Waktu Penyampaian LHP LKPP Tahun 2020 dan IHPS II Tahun 2020 tanggal 7 Juni 2021.
  - c. Surat masuk dari Pimpinan Komisi I DPR RI Nomor: 092/Kom.I/MP.V/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, hal: Permohonan Penjadwalan Laporan Komisi I DPR RI dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR RI, tentang hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas LDD RRI Periode 2021-2026.
  - d. Surat masuk dari DPD RI:
    - Surat Pimpinan DPD RI Nomor: PU.04/986 B/DPD RI/V/2021 tanggal 30 April 2021 hal Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI.
    - Surat Pimpinan DPD RI Nomor: PU.04/986 C/DPD RI/V/2021 tanggal 30 April 2021 hal Penyampaian Hasil Pandangan dan Pendapat DPD RI.

- e. Penetapan Keanggotaan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
2. **Selasa, 13 Juli 2021**, mengikuti Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI dengan agenda membahas antara lain:
- a. Membicarakan surat-surat masuk dari Presiden RI, yaitu:
- Nomor: R-27/Pres/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, perihal: RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Crime*)
  - Nomor: R-28/Pres/06/2021 tanggal 16 Juni 2021, perihal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
  - Nomor: R-29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni 2021, perihal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  - Nomor: R-31/Pres/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, perihal: RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
- b. Surat-surat masuk dari Presiden RI terkait dengan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia:
- Nomor: R-32/Pres/07/2021 tanggal 8 Juli 2021, perihal: Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas nama Sdr. Dame Diagne.
  - Nomor: R-33/Pres/07/2021 tanggal 8 Juli 2021, perihal: Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas nama Sdr. Marques Terrel Bolden.
  - Nomor: R-34/Pres/07/2021 tanggal 8 Juli 2021, perihal: Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas nama Sdr. Serigne Modou Kane.
- c. Surat masuk dari Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Nomor: LG/08073/DPR RI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, Hal: Penetapan RUU dalam rapat Paripurna.
- d. Penetapan Pejabat Publik:
- Ketua Komisi VII DPR RI Nomor: PW/08903/DPR RI/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, hal: Permohonan Penjadwalan Hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025
- e. Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU:
- Ketua Komisi II DPR RI Nomor: 204/KOM.II/VI/2021 tanggal 9 Juli 2021, hal: Permohonan perpanjangan pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- Pimpinan Pansus RUU tentang Landas Kontinen Nomor: LG/06380/DPR RI/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, hal: Permohonan perpanjangan waktu Pembahasan RUU tetang Landas Kontinen.
- f. Surat masuk dari Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Nomor: LG/09072/DPR RI/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, hal: Permohonan Penjadwalan Rapat Paripurna/Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- g. Surat masuk dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: AG/09161/DPR RI/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, perihal: Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022.
- h. Penetapan Alokasi Masa Sidang I TS 2021-2022.
- i. Penetapan Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d XI DPR RI Pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

## II. PENERIMAAN TAMU

### **Kamis, 24 Juni 2021, Melakukan Audiesi dengan Duta Besar India**

Pada hari Kamis, 24 Juni 2021 Pukul 19:00 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Audiensi yang didahului dengan agenda makan malam dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Mr. Shri. Manoj Kumar Bharti dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin mengapresiasi kerjasama antara Indonesia dan India, yang masih dapat terus dikembangkan. Khususnya dalam rangka meningkatkan hubungan strategi kedua negara di bidang ekonomi, politik, dan keamanan.
- 2) Perlunya peningkatan hubungan people to people antara Indonesia dan India, dalam rangka meningkatkan socio-cultural dan sektor pariwisata. Hubungan baik tersebut bisa dilakukan dengan peningkatan hubungan antar parlemen Indonesia dan India.
- 3) Duta Besar India untuk Republik Indonesia menyampaikan, Pemerintah India memandang potensi wisata yang luar biasa, sehingga diperlukan *travel bubble* antar kedua negara.

## III. KUNJUNGAN KERJA

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020 – 2021, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam tidak melakukan kunjungan kerja yang terkait dengan Bidang Politik dan Keamanan mengingat adanya himbuan dari Pemerintah tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait masa pandemi Covid 19.

#### IV. KEGIATAN LAIN-LAIN

- 1) **Rabu, 9 Juni 2021, Menghadiri Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia**  
Pada hari Rabu, 9 Juni 2021 Pukul 19:00 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan Silaturahmi dan Halal bi Halal Idul Fitri 1442 H Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara daring dan berlangsung secara tertutup.
- 2) **Kamis, 10 Juni 2021, Menghadiri Sidang Promosi Doktor (S3) Bapak Edhie Baskoro Yudhoyono.**  
Pada hari Kamis, 10 Juni 2021 Pukul 13:00 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan Sidang Promosi Doktor (S3) Bapak Edhie Baskoro Yudhoyono Program Studi Manajemen Bisnis, dengan judul disertasi “Strategi Pembiayaan dan Investasi Untuk Pengembangan Pariwisata Terpadu di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo” secara daring dan dilaksanakan secara tertutup.
- 3) **Selasa, 15 Juni 2021, Audiensi dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI)**  
Pada hari Selasa, 15 Juni 2021 Pukul 12:30 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melakukan Audiensi dengan Ketua Umum Olimpiade Indonesia (KOI) yang didahului dengan kunjungan ke Kantor KOI di FX Sudirman, Jakarta Selatan, dalam rangka menghadiri dan memberikan arahan kepada Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI) dalam mengembangkan olahraga cricket di Indonesia.
- 4) **Jum’at, 18 Juni 2021, Menghadiri Munas IX Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)**  
Pada hari Jum’at, 18 Juni 2021 Pukul 09.30 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri Undangan Pembukaan Munas IX Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang dilaksanakan secara daring/*online* dengan tema “Tantangan Digitalisasi dan Finansial sebagai Resiliensi Perempuan Pengusaha Bangkit di Masa Pandemi dan di Era New Normal” dan berlangsung secara tertutup.
- 5) **Senin, 21 Juni 2021, Menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI**  
Pada hari Senin, 21 Juni 2021 Pukul 09:00 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri agenda penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia sekaligus *talkshow* yang mengangkat tema “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan” yang berlangsung di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI secara daring/*online*.
- 6) **Senin, 21 Juni 2021, Menghadiri Peluncuran Buku Dubes RI di Kyiv**  
Pada hari Senin, 21 Juni 2021 Pukul 16:00 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meghadiri dan memberikan selamat atas peluncuran buku “Perjalanan Kerja Tahun IV Duta Besar Republik Indonesia di Kiev, Ukraina Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi Tahun 2020-2021” yang berlangsung secara daring/*online*.

**7) Rabu, 30 Juni 2021, Menghadiri Rapat 2<sup>nd</sup> Pacific Expotion**

Pada hari Rabu, 30 Juni 2021 Pukul 10:00 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meghadiri Rapat *The 2<sup>nd</sup> Pacidic Expotion* dengan Duta Besar Republik Indonesia di Wellington yang berlangsung secara *daring* dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, secara geopolitik, Indonesia mempunyai letak yang strategis, yaitu antara persilangan dua samudera dengan dua benua. Sehingga wilayah kedaulatan Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Dari Sembilan *sea lines of communication* dunia, empat di antaranya ada di Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Indonesia berfungsi sebagai the global supply chain system di satu sisi, sekaligus menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai *centre of gravity* bagi Kawasan Indo-Pasifik.
- b. Kawasan Indo Pasifik adalah konstalasi jalur yang menghubungkan pusat-pusat peradaban global, dimana kini bandul dinamika perekonomian global sedang bergerak ke kawasan ini, setelah sejumlah negara – mulai dari Samudera Hindia (seperti India dan Australia) hingga ke Samudera Pasifik (seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Negara-negara anggota ASEAN) – mulai mendominasi peta perekonomian global dalam beberapa dekade terakhir.
- c. Dengan demikian, Indonesia memiliki kepentingan dan tanggungjawab untuk ikut serta dalam membangun perdamaian, harmoni, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. *Pacific Exposition* adalah salah satu instrumen yang sejauh ini berhasil dan disepakati oleh banyak negara untuk membangun kerjasama perdagangan antar negara demi meningkatkan taraf perekonomian semua negara yang terlibat di dalamnya.
- d. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam lebih lanjut menegaskan, DPR RI dalam hal ini merepresentasikan aspirasikan dari seluruh rakyat Indonesia, perlu mendukung upaya ini, demi meningkatkan konektifitas kerjasama yang lebih erat antar bangsa, khususnya melalui kerjasama *Business to Business (B to B)* ataupun *People to People*.

**8) Kamis, 1 Juli 2021, Menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke 75**

Pada hari Kamis, 1 Juli 2021 Pukul 08:00 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meghadiri undangan Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke 75 dengan tema Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid- 19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju dan berlangsung secara *daring*.

**9) Kamis, 8 Juli 2021, Menghadiri Seminar Merajut Nusantara oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Hari Pertama**

Pada hari Rabu, 8 Juli 2021 Pukul 13:30 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meghadiri Seminar Merajut Nusantara oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia hari pertama yang mengangkat tema “Peran Generasi

Milenial dalam Membangun e-Democracy” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, karakter dinamika politik di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh kerangka platform perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sejak Pemilu tahun 2014 dan rangkaian Pilkada, perangkat TIK makin mempertegas pentingnya peranan *electronic democracy (e-Democracy)* atau demokrasi digital (*digital democracy*) dalam proses pembangunan politik di Indonesia.
- b. Generasi milenial sangat potensial karena memiliki karakteristik tersendiri dan berpengaruh dalam keikutsertaan di dalam politik bangsa. Ciri generasi milenial yaitu:
  - Critical (berpikir kritis),
  - Change (senang akan perubahan),
  - Communicative (mengkomunikasikan pilihannya dengan pihak lain), serta
  - Community (tergabung dalam komunitas)
- c. *e-Democracy* adalah suatu metode untuk menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi abad ke-21 guna mempromosikan nilai-nilai politik dalam kerangka sistem demokrasi. Oleh sebab itu, generasi millennial memiliki posisi penting di era e-Democracy ini. Karakter mereka yang kritis, inovatif, komunikatif, dan berkelompok, bisa menjadi unsur pendorong untuk memasyarakatkan kebudayaan *e-Democracy*. Sehingga partisipasi masyarakat dalam politik bisa lebih optimal.

#### **10) Jum'at, 9 Juli 2021, Menghadiri Seminar Merajut Nusantara oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Hari Kedua.**

Pada hari Kamis, 1 Juli 2021 Pukul 13:30 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meghadiri Seminar Merajut Nusantara oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia hari kedua yang mengangkat tema “Peran Milenial dalam Membumikan Pancasila melalui Politik Digital” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, dinamika politik Indonesia abad ke-20 diwarnai dengan meluasnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan, industrialisasi dalam batas-batas tertentu, urbanisasi, disintegrasi masyarakat primitif, serta lompatan teknologi yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan pada ranah struktur sosio-kultural. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pentas politik abad 21 ini, akan kembali diwarnai dengan fenomena khas kaum muda, seperti progresifitas, kreatifitas, inovasi dan kompetisi.
- b. Di era Revolusi Industri 4.0 yang penuh peluang dan tantangan, Pancasila masih relevan bagi bangsa Indonesia, baik sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi yang sarat akan ideologi lainnya, seperti liberalisme dan kapitalisme. Untuk itu, Pancasila harus selalu dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia yang multikultural dan heterogen.
- c. Menciptakan generasi yang unggul dan berkarakter memang sulit dan butuh perjuangan, maka dari itu, harus diterapkan sejak pendidikan di usia dini. Agar generasi unggul yang diciptakan melalui pendidikan Pancasila juga diharapkan dapat terus memegang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya.

**11) Sabtu, 10 Juli 2021, Memberikan *Keynote Speech* pada Webinar IKA Trisakti**

Pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 Pukul 09:00 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri dan memberikan *Keynote Speech* Seminar Ikatan Alumni Trisakti yang mengambil tema “Siaga Penanganan Covid-19, Isolasi Mandiri atau Ke Ruma Sakit” pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan keprihatinan atas lonjakan kasus positif Covid-19 yang sudah menginjak diatas 2 juta jiwa, dengan jumlah kasus perhari mencapai lebih dari 30.000 kasus.
- b. Dalam rangka menghadapi lonjakan kasus Covid 19, Pemerintah perlu mempercepat terbentuknya kekebalan kawanan (*herd immunity*) dengan mendorong agar program vaksinasi nasional berlangsung lebih massif dan progresif. Selain itu, diperlukan perbaikan dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan (*Health System Resilience*), serta memberdayakan bidang Pendidikan untuk mencapai penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kesehatan dan sistem penopang kebutuhan dasar hidup lainnya.
- c. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan perlunya memberikan prioritas yang lebih pada sektor pendidikan dan akademik. Agar ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berkembang pesat di negeri ini. Negara harus mendukung kaum muda untuk dalam melakukan inovasi dan pengembangan ilmiah, agar bisa diabdikan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

**12) Sabtu, 10 Juli 2021, Menghadiri Seminar Merajut Nusantara oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Hari Ketiga.**

Pada hari Kamis, 1 Juli 2021 Pukul 13:30 WIB, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri Seminar Merajut Nusantara oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia hari ketiga yang mengangkat tema “Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Alat Pemersatu Negara” dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, Masyarakat Indonesia telah memasuki era digital (*digital society*), yaitu suatu realitas hidup di abad 21 dimana manusia dalam berbagai sektor kehidupannya terpaut dengan teknologi digital. Indonesia masuk dalam pusaran derasnya arus informasi yang dipacu oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- b. Fenomena maraknya penyebaran paham radikal di ruang digital terjadi karena masyarakat merasa kehadiran ruang digital bukan merupakan bagian dari realitas. Di sini peran penting literasi digital, kita harus memberikan pemahaman apa yang kita lakukan secara fisik seharusnya terefleksikan juga saat beraktivitas di ruang digital. Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tengah diusik oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah rakyat. Dengan menebarkan teror, intimidasi, dan ancaman melalui berita-berita hoaks agar rakyat terus dihantui ketakutan.

- c. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan menjadikan Pancasila sebagai pembatas dari pemahaman yang menggerus kedaulatan negara. Era digital menghadirkan peluang dan tantangan bagi masyarakat Indonesia terkhusus generasi muda. Oleh karenanya penting untuk melakukan filtering sehingga masyarakat tidak menjadi korban banjir informasi di era digital
- d. Sebagai penutup, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Pemerintah dan DPR, memiliki kewajiban mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Beberapa di antaranya dengan cara membangun kerangka hukum yang adaptif dalam rangka menyambut tantangan masa depan, serta membangun infrastruktur komunikasi dan internet hingga ke seluruh pelosok negeri.